

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah sudah melakukan reformasi akuntansi dan administrasi di sektor publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Tujuan reformasi tersebut adalah untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan di daerah yang salah satu tugasnya adalah mengelola keuangan daerah. Pemerintahan daerah menjalankan prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Dalam UU No. 17 Tahun 2003, disebutkan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Sedangkan gubernur, bupati, maupun walikota selaku kepala pemerintahan daerah diberikan tugas untuk mengelola keuangan daerah serta mewakili daerah dalam kepemilikan atas kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fenomena laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang telah peneliti baca melalui internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Seperti, akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah belum sesuai dengan SAP. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah (BPK RI, 2017). Penyimpangan yang terjadi dalam mengelola keuangan salah satunya yaitu terutama pada pemanfaatan APBD yang memiliki ketimpangan antara porsi belanja pegawai yang mencapai 36,8 persen dengan belanja modal yang hanya 20 persen, dikarenakan masih banyak pemerintah daerah yang lambat merealisasikan belanja modal sehingga simpanan uang anggaran di bank semakin meningkat setiap tahun, bahkan sisa lebih pembiayaan anggaran-nya makin besar. (Kompasiana.com)

Banyak kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu diteliti lebih dalam lagi. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, serta buruknya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, kurangnya kompetisi antar staf akuntansi serta sistem pengendalian intern memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini di beberapa instansi pemerintahan daerah

yang ada di Indonesia. Opini tersebut diberikan terhadap laporan keuangan, karena BPK mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara umum disebabkan oleh penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum benar, kurangnya Kapasitas dan Kompetensi Staf Akuntansi yang ada, Pemanfaatan Teknologi Informasi yang belum maksimal serta penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang belum memadai.

BPK Perwakilan Provinsi Sumut mengungkapkan sejumlah masalah yang ditemukan pada laporan keuangan masing-masing Pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2017 di Sumut, yang antara lain terdapat kekurangan kas pada bendahara pengeluaran, aset tidak tetap yang tidak diyakini kebenarannya karena terdapat perbedaan nilai di neraca dengan nilai pendukung, kemudian masalah kekurangan volume pekerjaan pengadaan jasa konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak, serta masalah realisasi belanja barang dan jasa tidak dapat diyakini kewajarannya. (Medanbisnisdaily.com)

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah, agar laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dimaksud dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Serta untuk mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam mengelola keuangan negara. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi

yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan tersebut disajikan dengan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya, merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan. Dan setiap tahunnya, BPK memberikan penilaian berupa opini. Terdapat empat opini yang diberikan yaitu: *Unqualified Opinion* (Opini Wajar Tanpa Pengecualian), *Qualified Opinion* (Opini Wajar Dengan Pengecualian), *Adverse Opinion* (Opini Tidak Wajar), dan *Disclaimer of Opinion* (Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Opini). Tahun 2017 yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap tangan sejumlah pejabat BPK dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengenai kasus suap yang diberikan oleh Irjen Kemendes PDTT, Sugito kepada Auditor Utama BPK, Rochmadi Saptogiri untuk mengubah status WDP menjadi WTP. Irjen Kemendes PDTT, Sugito dan Pejabat Eselon III Kemendes, Jarot Budi Prabowo diduga memberikan suap Rp240 juta kepada Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri dan Auditor BPK lain yaitu Ali Sadli. (Antaraneews.com)

Dilihat dari kasus diatas, bahwa semua pemerintah daerah sangat menginginkan opini WTP dan untuk memperoleh opini tersebut mereka akan

melakukan berbagai cara, baik dengan memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta meningkatkan fasilitas pendukung untuk akuntansi dan pelaporan keuangannya ataupun bisa melalui kerja sama dengan konsultan yang berasal dari Pemerintah seperti (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Badan Pemeriksa Keuangan) dan swasta.

Tiap Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga NonKementerian di tingkat Pusat ataupun Pemerintah di tiap daerah memang terobsesi untuk mendapatkan predikat opini WTP dari BPK setiap tahunnya setelah Lembaga Negara tersebut mengaudit laporan keuangan masing-masing Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Non Kementerian di tingkat Pusat hingga Pemerintah Daerah. Status WTP diberikan bila dalam laporan keuangan memberikan informasi yang terbebas dari salah saji material. Auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, laporan keuangannya sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih belum dikatakan sempurna dan belum memenuhi kriteria keterandalan (*reliability*), kepatuhan (*compliance*) dan ketepatanwaktuan (*timeliness*). Mengingat bahwa keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, peneliti tertarik untuk meneliti hal apa yang mungkin mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2017 atas LKPD seluruh Indonesia Tahun 2016, BPK memeriksa 537

(99%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2016. Sedangkan 5 pemerintah daerah lainnya terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, Pemkab Aceh Tenggara, Pemkab Pidie, Pemkab Pidie Jaya, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe di wilayah Provinsi Aceh. Dari hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas 375 (70%) LKPD, opini WDP atas 139 (26%) LKPD, dan opini TMP atas 23 (4%) LKPD. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 272 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). (Bpk.go.id/ihps/)

Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa LKPD yang belum memperoleh opini WTP disebabkan masih terdapat kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu : (1) pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, (2) proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan SAP, (3) terlambat menyampaikan LKPD, (4) sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, (5) sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai, serta (6) masih lemahnya sistem pengendalian intern. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum optimal.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diungkapkan bahwasanya, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat

memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang merupakan ukuran normatif antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, maka pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah tidak terlepas dari peran staf akuntansi selaku Sumber Daya Manusia yang berperan sebagai pihak yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang akuntansi. Sebagai wujud dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia merupakan elemen dari organisasi yang memiliki peran sangat penting. Sehingga harus dapat dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin guna membantu upaya pencapaian yang dimaksud oleh organisasi bersangkutan. Sumber daya manusia yang memahami logika akuntansi dapat mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Namun faktanya di Indonesia, kita masih kekurangan kapasitas SDM yang mengelola keuangan negara khususnya yang memiliki kelemahan dibidang akuntansi. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2017, masih terdapat 162 dari 537 pemda yang memiliki kelemahan dalam penyajian laporan keuangan sesuai SAP, terutama pada akun-akun yang disajikan antara lain pada penyajian akun aset lancar, akun aset tetap, akun aset lainnya, akun lain-lain pendapatan daerah yang sah, akun belanja operasi, akun belanja modal, akun beban operasi, dan akun lainnya. Dapat disimpulkan, kapasitas sumber daya manusia dari 162 pemda belum optimal.

Selain kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi juga sangat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan terutama terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang, maka pekerjaan para staf akuntansi dalam memproses pengelolaan datanya akan lebih cepat dan mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagai seorang staf harus lebih baik dalam mengelola pelaporan keuangan serta dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Jika yang terjadi sebaliknya, maka pemanfaatan teknologi informasi justru akan mempersulit pekerjaan para staf. Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh pemerintah daerah sudah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, keakuratan, dan ketepatanwaktuan dalam menyampaikan informasi. Namun faktanya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2017 masih terdapat 5 pemda yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal.

Selain kapasitas SDM dan pemanfaatan TI, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga berperan sebagai metode untuk mengawasi dan memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan pemda untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya, sehingga hal-hal yang telah direncanakan dapat terlaksana.

Menurut BPK RI, kelemahan sistem pengendalian intern merupakan faktor yang menyebabkan pengecualian opini LKPD. Kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah, menyebabkan kesalahan dalam pencatatan serta penyimpangan laporan keuangan. Dengan adanya penyimpangan terhadap laporan keuangan, maka dapat dikatakan LKPD tersebut belum memenuhi karakteristik yang disyaratkan, yaitu keterandalan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (Armando, 2013). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2017, faktanya masih terdapat 6.053 kelemahan terhadap sistem pengendalian intern, yang terdiri dari 2.156 permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.657 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.240 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah belum optimal.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang Kualitas Laporan Keuangan. Yosefrinaldi (2013) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Studi Empiris pada Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kemudian Suwanda (2015) melakukan penelitian dengan judul *Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel yang digunakan yaitu penerapan SAP, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara signifikan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Mohammad Hadi Khorashadi Zadeh *et al.* (2015) melakukan penelitian dengan judul *The Effect of Information Technology on the Quality of Accounting Information*. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Teknologi Informasi beserta dimensinya (yaitu, ketepatan waktu, relevansi, akurasi, kecukupan, dan tingkat transfer yang sebenarnya) mempengaruhi Kualitas Informasi Akuntansi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran.

Kemudian Ochung (2017) melakukan penelitian dengan judul *Factors Influencing Quality of Financial Reporting in Public Sector Entities in the Ministry of Environment and Natural Resources Kenya*. Dan hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa variabel Audit Internal, Komite Audit dan penerapan IPSAS berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan di Kenya.

Selanjutnya Julita dan Susilatri (2018) juga melakukan penelitian dengan judul *Analysis of Factor Affecting the Quality of Government Financial Report Bengkalis Regency*. Dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Teguh Erawati dan Muhammad Firas (2018) juga melakukan penelitian terkait dengan judul Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas LKPD. Sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas LKPD.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Teguh Erawati (2018). Peneliti juga mengambil penelitian Suwanda (2015), Zadeh *et al.* (2015), Ochung (2017), serta Julita dan Susilatri (2018) sebagai rujukan. Penelitian ini memiliki perbedaan terhadap penelitian Erawati. Pertama, perbedaan terletak pada objek penelitian, dimana peneliti sebelumnya meneliti objek populasi pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Sedangkan peneliti memfokuskan objek populasi pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Alasan peneliti mengambil objek penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan LKPD Pemkab Aceh Tamiang tahun 2017 memperoleh opini WTP dari BPK. Meskipun sudah memperoleh opini WTP, tetapi dari hasil pemeriksaan BPK RI, masih terdapat kelemahan yang berkaitan dengan SPI yaitu seperti pengelolaan kas dan aset tetap belum tertib serta pengelolaan investasi permanen pemerintah belum memadai. Selain itu masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal dan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka belum dicairkan (BPK RI, 2017). Kedua, variabel yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan tiga variabel bebas yaitu, pemahaman SAKD, Kapasitas SDM, dan Pemanfaatan TI. Sedangkan penelitian ini menggunakan dua variabel bebas dari peneliti terdahulu yaitu Kapasitas SDM dan Pemanfaatan TI dengan menambahkan SPIP sebagai variabel bebas ketiga.

Maka judul dari penelitian ini adalah *“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang”*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa pokok masalah, antara lain:

- 1) Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum optimal di beberapa pemerintah daerah di Indonesia, ditunjukkan dengan 162 dari 537 LKPD yang belum memperoleh opini WTP.

- 2) Kapasitas sumber daya manusia beberapa pemerintah daerah di Indonesia belum optimal, ditunjukkan dengan masih terdapat 162 pemda yang memiliki kelemahan akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP.
- 3) Beberapa pemerintah daerah di Indonesia belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal untuk menjalankan aktivitas pelaporan keuangannya, ditunjukkan dengan terdapat 5 pemda yang terlambat melaporkan laporan keuangannya.
- 4) Sistem pengendalian intern pemerintah belum digunakan secara optimal di beberapa pemerintah daerah di Indonesia, ditunjukkan dengan terdapat 6.053 permasalahan sistem pengendalian intern.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini difokuskan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Oleh karena banyak faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, penelitian ini hanya meneliti tiga faktor yang diduga berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pemilihan faktor-faktor diatas, diduga karena faktor-faktor tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 3) Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah?
- 4) Apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Untuk mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 4) Untuk mengetahui Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

1) Bagi Peneliti

Manfaat yang diterima peneliti, yaitu agar dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta agar dapat mengimplementasikan apa yang telah peneliti dapat dari perguruan tinggi melalui penyusunan tugas akhir skripsi.

2) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi penambah wawasan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama.

3) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas laporannya.